

## OPINI DAN SIKAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG TENTANG PEMBERITAAN POLITIK SETYA NOVANTO

### *Opinions and Attitudes Member of Parliament Pinrang on Preaching Politics Novanto*

Ismail

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin, Makassar (magnumopus000@gmail.com)

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**  
*attitudes, opinions,  
neutrality and balance  
media*

**Katakunci:**  
*sikap, opini, netralitas  
dan perimbangan  
media*

**How to cite:**  
*Ismail. (2019). Opini  
dan Sikap Anggota  
DPRD Kabupaten  
Pinrang tentang  
Pemberitaan Politik  
Setya Novanto. Kareba  
: Jurnal Ilmu  
Komunikasi, 8(1),  
204-211.*

#### ABSTRACT

*This study started from airings of news about Novanto in three media, namely Metro TV, TV One, and Kompas TV in which the media gave conflicting reports and opinions of each lead viewers to follow the direction of the mind preaching. The purpose of this study was to determine the attitude and opinion Pinrang legislators about the political news Novanto and neutrality and balance of Metro TV news, Kompas TV and TV One. This study uses a methodology or a qualitative descriptive approach. The research location Parliament Office Pinrang with a population of 40 Members of Parliament Pinrang. Data analysis techniques used in this research is descriptive analysis technique to describe the attitudes and opinions legislators Pinrang on news politics Novanto and neutrality and balance of news Metro TV, Kompas TV and TV One. The results of this study showed that a majority of 40 members Pinrang parliament considers that Metro TV and TV One did make news impartially and unbalanced. Only Kompas TV is considered neutral by coincidence owner is not a party person. The majority of legislators Pinrang opined that the media trying to create a setting in each of its news agenda, especially in Metro TV, TV One, and only Kompas TV is likely to be more balanced in its news. Neutrality and Balance media by legislators Pinrang never happened, it's just an ideal level to be achieved. Media today has become a conglomerate and industrialization so impossible to say that there are no conflicts of interest that play there, the media should be independent sources of information for the public.*

#### Abstrak

Penelitian ini berawal dari mencuatnya pemberitaan mengenai Setya Novanto di tiga media yaitu Metro TV, TV One, dan Kompas TV yang mana media tersebut memberi pemberitaan yang saling bertolak belakang dan masing-masing menggiring opini pemirsanya untuk mengikuti arah pikiran pemberitaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap dan opini anggota DPRD Kabupaten Pinrang tentang pemberitaan politik Setya Novanto dan netralitas dan perimbangan pemberitaan Metro TV, Kompas TV dan TV One. Penelitian ini menggunakan metodologi atau pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang

dengan populasi 40 Anggota DPRD Kabupaten Pinrang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif untuk mendeskripsikan sikap dan opini anggota DPRD Kabupaten Pinrang tentang pemberitaan politik Setya Novanto dan netralitas dan perimbangan pemberitaan Metro TV, Kompas TV dan TV One. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas 40 orang anggota DPRD Kabupaten Pinrang menganggap bahwa Metro TV dan TV One memang memihak dan membuat pemberitaan yang tidak berimbang. Hanya Kompas TV yang dianggap netral karena kebetulan pemiliknya bukan orang partai. Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang beropini bahwa media berusaha menciptakan agenda setting dalam setiap pemberitaannya terutama dalam Metro TV, TV One, dan hanya Kompas TV yang cenderung lebih berimbang dalam pemberitaannya. Netralitas dan Perimbangan media menurut anggota DPRD Kabupaten Pinrang tidak pernah terjadi, itu hanya suatu tataran ideal yang hendak dicapai. Media saat ini sudah menjadi konglomerasi dan industrialisasi jadi mustahil untuk mengatakan kalau tidak ada konflik kepentingan yang bermain di sana, seharusnya Media menjadi sumber informasi yang independen bagi masyarakat.

*Copyright © 2019. KAREBA. All rights reserved.*

## **1. PENDAHULUAN**

Fenomena politikus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Pusat di Senayan selalu menjadi berita hangat khususnya Pemberitaan Politik. Sebagian melilit permasalahan Hukum oleh para anggotanya, besar kemungkinan karena kepentingan politik dan kelompoknya boleh jadi karena kurangnya komunikasi politik, Menurut Cangara (2014-a), pengertian Komunikasi Politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang- lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Pengertian lain yakni komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Hampir sama dengan komunikasi secara umum, jenis pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi politik adalah hal-hal yang berkenaan dengan politik. Terdapat beragam saluran komunikasi politik. Pada dasarnya saluran komunikasi politik sama dengan saluran komunikasi secara umum. Oleh karena itu komunikasi di sini diartikan sebagai proses interaksi antara pengirim dan penerima, sehingga dapat melahirkan respon, Proses respon ini sangat tergantung dari konstruksi makna yang dibangun masing-masing pihak yang terlibat dalam komunikasi. Tidak hanya sampai di situ, konstruksi makna yang dibangun masing-masing pihak sangat dipengaruhi oleh kerangka berpikir dan term of reference (Hasrullah, 2014).

Penyebaran informasi tidak lepas dari peran pers, jurnalis dan media massa, dari berbagai aktivitas pers dan jurnalistik, dirumuskan 4 fungsi dan tanggung jawab pers, yakni informasi, edukasi, entertainment dan kontrol sosial. Dalam perspektif politik, kontrol sosial dimaksudkan adalah untuk mengawasi perilaku sosial dan politik masyarakat terutama pihak kekuasaan (wacht dog), Transparansi akuntabilitas publik bagi para pejabat dan media bagi pendapat rakyat. Itu sebabnya Pers termasuk salah satu dari 4 pilar demokrasi (the fourth estate): eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers.

Media massa adalah agen sosialisasi memainkan peranan penting dalam transmisi sikap, pikiran dan hubungan. Konsep kebebasan pers sangat tergantung pada sistem politik di mana pers itu berada. Di negara komunis atau otoriter, kebebasan pers dikembangkan untuk membentuk opini yang mendukung penguasa. Sedangkan di negara liberal kebebasan pers pada prinsipnya diarahkan untuk menuju suatu perubahan masyarakat yang sehat, cerdas bebas berpendapat dan berdemokrasi. Pemberitaan media massa dan media sosial yang begitu ramai, tidak terlepas tiga stasiun TV berita,

yaitu TV One, Metro TV, dan Kompas TV. Metro TV misalnya dalam memberitakan kasus Setya Novanto cenderung menyudutkan, sehingga Setya Novanto melalui kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, melaporkan Metro TV ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas dugaan penghasutan. Razman Arif Nasution mengatakan "Ini karena mereka (Metro TV) telah membocorkan percakapan dalam sidang tertutup Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) beberapa waktu yang lalu," ujarnya di Bareskrim, Senin, 14 Desember 2015. Razman menilai Metro TV tidak memiliki legalitas hak penyiaran atas hasil sidang tertutup MKD yang melakukan pemeriksaan etik terhadap Setya Novanto. Menurut Razman A. Nasution, Metro TV telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada hari Rabu, 2 Desember 2014, TV One mengundang Margarito untuk membahas sidang MKD tentang kasus Setya Novanto dengan mengundang Sudirman Said sebagai Pelapor. Jika TV yang lain menyiarkan berita siaran langsung pemutaran rekaman percakapan Setya Novanto bersama Koleganya yang dijadikan barang bukti dalam kasus tersebut, TV One justru membuat bahasan yang berbeda dengan mempertanyakan legalitas standing Sudirman Said.

Jika kedua media di atas dalam pemberitaannya cenderung menunjukkan pro dan kontra terhadap kasus Setya Novanto, maka Kompas TV berusaha netral dan dengan apa adanya sebagaimana terlihat pada tayangan : Senin 14 Desember 2015 : 21.00 wib, "Diperiksa 10 jam Maroef Syamsoeddin sebut kejangung dalam soal rekaman". Selasa 15 Desember 2015 : 07.43 wib, "Ditunggu tindak lanjut kemarahan Presiden (agar proses penanganan kasus Freeport tidak melenceng kemana-mana, Peran media sangat sentral untuk melakukan pengawalan)". Rabu 16 Desember 2015 : 23.15 wib, "Setya Novanto : Saya minta maaf, ini semua demi rakyat, semuanya demi bangsa Indonesia".Jumat 05 Februari 2016 : 21.00 wib "Perkara Pemufakatan jahat masih belum naik ke penyidikan". Begitu pun di Harian Kompas pada tanggal 09 Februari 2016 dengan tajuk "Sepak Terjang Setya Novanto". Kompas TV dalam pemberitaannya berusaha tidak memojokkan Setya Novanto serta tidak pula berusaha memberitakan isu yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini dan sikap anggota DPRD Kabupaten Pinrang terkait Pemberitaan media tentang Setya Novanto dalam Metro TV, Kompas TV, dan TV One guna mengungkap netralitas dan perimbangan pemberitaan media.

## **2. BAHAN DAN METODE**

### **2.1. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

### **2.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang. Adapun waktu penelitian dilakukan sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2016.

### **2.3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anggota DPRD Kabupaten Pinrang periode 2014-2019 yang berjumlah 40 orang dan sekaligus dijadikan sampel penelitian yang digunakan sebagai data kuantitatif sedangkan untuk data kualitatif digunakan informan sebanyak 5 orang anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari partai Golkar.

### **2.4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari responden dengan menggunakan instrumen angket (kuesioner) yang dibagikan kepada 40 orang anggota DPRD Kabupaten Pinrang dan wawancara kepada 5 orang anggota DPRD Kabupaten Pinrang dari Partai Golkar tentang Opini dan Sikap anggota DPRD Kabupaten Pinrang terkait dengan pemberitaan politik Setya Novanto pada Metro TV, Kompas TV, dan TV One sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pemberitaan Setya Novanto di Media massa.

## **2.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu untuk data kuantitatif digunakan instrumen kuesioner dengan skala *Likert* sedangkan untuk data kualitatif digunakan instrumen wawancara sedangkan untuk data pendukung data dikumpulkan dengan teknik observasi, studi dokumentasi dan studi pustaka.

## **2.6. Teknis Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

# **3. HASIL PENELITIAN**

## **3.1. Sikap anggota DPRD Kabupaten Pinrang tentang pemberitaan Setya Novanto dalam Metro TV, Kompas TV, dan TV One**

Hasil analisis deskriptif kuantitatif memperlihatkan bahwa dari pernyataan pertama yang menganggap bahwa pemberitaan media tentang Setya Novanto terlalu dibesar-besarkan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan kedua yaitu pemberitaan media terlalu menyudutkan Setya Novanto mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang juga menyatakan sikap setuju. Pernyataan ketiga yaitu pemberitaan Metro TV tentang Setya Novanto biasa-biasa ditanggapi mayoritas responden dengan sikap setuju. Pernyataan keempat yaitu pemberitaan TV One cenderung membela Setya Novanto mayoritas responden juga menyatakan sikap setuju. Pernyataan kelima yaitu Kompas TV netral dalam memberitakan Setya Novanto mayoritas responden juga menyatakan sikap setuju.

## **3.2. Opini anggota DPRD Kabupaten Pinrang tentang pemberitaan Setya Novanto dalam Metro TV, Kompas TV, dan TV One**

Hasil analisis deskriptif kuantitatif memperlihatkan bahwa dari pernyataan pertama yang menganggap bahwa Tekanan Media Kepada Setya Novanto yang menyebabkannya mundur mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang menyatakan tidak setuju. Pernyataan kedua yaitu Setya Novanto mundur karena tekanan dari Ketua Umum Partai Golkar mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang menyatakan netral. Pernyataan ketiga yaitu Setya Novanto mundur karena desakan dari kader-kader Partai Golkar ditanggapi mayoritas responden dengan sikap sangat setuju. Pernyataan keempat yaitu Setya Novanto mundur karena karena memang melanggar Kode Etik sikap setuju.

## **3.3. Netralitas dan perimbangan Metro TV, Kompas TV dan TV One dalam memberitakan kasus Setya Novanto versi anggota DPRD Kabupaten Pinrang**

Hasil analisis deskriptif kuantitatif memperlihatkan bahwa dari pernyataan pertama bahwa Metro TV menjustifikasi bahwa Setya Novanto melanggar Kode Etik mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan kedua yaitu Pemberitaan TV One terlalu

membela Setya Novanto mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang juga menyatakan sikap setuju. Pernyataan ketiga yaitu Pemberitaan Kompas TV tentang Setya Novanto netral ditanggapi mayoritas responden dengan sikap setuju.

### **3.4. Kepentingan yang melatarbelakangi Metro TV, Kompas TV dan TV One dalam meliput Pemberitaan Politik Setya Novanto menurut anggota DPRD Kabupaten Pinrang**

Hasil analisis deskriptif kuantitatif memperlihatkan bahwa dari pernyataan pertama yang menganggap bahwa Kepentingan Pemilik Media mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang menyatakan tidak setuju. Pernyataan kedua yaitu Pemilik Metro Tv adalah ketua umum partai mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang menyatakan tidak setuju. Pernyataan ketiga yaitu Pemilik TV One adalah ketua umum partai Setya Novanto ditanggapi mayoritas responden dengan sikap setuju. Pernyataan keempat yaitu Pemilik Kompas TV bukan orang partai ditanggapi mayoritas responden dengan sikap netral.

## **4. PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa opini dan sikap anggota DPRD Kabupaten Pinrang tentang pemberitaan Setya Novanto dalam Metro TV, Kompas TV, dan TV One menganggap bahwa media terlalu membesar-besarkan atau mendramatisir pemberitaan tentang Setya Novanto. Metro TV terlalu membesar-besarkan pemberitaan tentang Setya Novanto yang mana masalah pemberitaan tersebut seharusnya berprinsip pada asas praduga tak bersalah, Metro TV seakan-akan menjustifikasi bahwa Setya Novanto memang melakukan pelanggaran kode etik padahal pada saat itu proses persidangan di Majelis Kehormatan Dewan (MKD) masih sementara berlangsung dan belum memutuskan apakah Setya Novanto melakukan pelanggaran kode etik atau tidak. Sejalan dengan itu TV One juga dianggap responden tidak bersikap netral karena TV One seakan-akan menjadi pengacara Setya Novanto, berita yang dihadirkan disetting agar Setya Novanto tidak melanggar kode etik sebagai anggota dewan. TV One selalu membuat berita yang mengcounter pemberitaan Metro TV. Jadi kedua media ini berperang dalam berita tentang Setya Novanto, yang satu memberitakan tentang keburukannya dan yang satunya lagi memberitakan tentang kebaikan Setya Novanto. Netralitas dan perimbangan media hanyalah dalam tataran konsep semata, dari ketiga media yang menjadi fokus penelitian yaitu Metro TV, TV One, dan Kompas TV hanya Kompas TV yang dianggap paling netral. Itupun karena pemilik Kompas TV tidak bergelut dalam dunia politik. Netralitas dan perimbangan pemberitaan media masih sebatas konsep belaka.

Hal itulah yang melatar belakangi sehingga Mayoritas Anggota DPRD Kabupaten Pinrang menyikapi bahwa pemberitaan kedua media tersebut tentang Setya Novanto tidak netral dan objektif. Kompas TV dianggap lebih netral ketimbang kedua media tersebut karena porsi pemberitaan Kompas TV tentang Setya Novanto terbilang kecil dan memang berita yang diangkat diikuti dari hasil sidang yang terjadi di MKD, tidak membuat opini yang seakan-akan menggiring masyarakat untuk menyatakan bahwa Setya Novanto melanggar kode etik ataupun sebaliknya, jadi pemberitaannya murni sebagai berita politik biasa.

Hal ini tentu saja berbeda atau bertolak belakang dengan prinsip pemberitaan media yang semestinya bersikap netral dan steril dari kepentingan-kepentingan apatah lagi kepentingan politik. Apapun bentuk sebuah media, prinsip yang harus dijaga yaitu kepercayaan atau *trust* untuk memenuhi kredibilitas berdasarkan etik. Independensi termasuk dalam etik yaitu kegiatan jurnalistik tanpa campur tangan pemilik atau kekuatan lain yang mengatur isi media. Sedangkan prinsip netralitas akan menghasilkan liputan yang akurat, proporsional, jujur dan berimbang serta memihak kepentingan

publik. Media telah menjadi aktor utama dalam bidang politik dan memiliki kemampuan untuk membuat seseorang cemerlang dalam karier politiknya (Cangara, 2014-b).

Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang juga menganggap bahwa media terlalu menyudutkan Setya Novanto padahal seharusnya media menjadi kontrol sosial bagi masyarakat bukan malah menggiring opini masyarakat kearah yang dikehendaki oleh para pemilik media. Saat ini media telah menjadi alat politik dan propaganda bagi segelintir orang. Media menjelma menjadi mesin politik yang luar biasa besar, di tengah-tengah kebingungan masyarakat yang haus akan informasi. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip teori Efek media yang diartikan sebagai dampak dari kehadiran sosial yang dimiliki media, yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku manusia oleh karena terpaan media. Selanjutnya, Menurut Schramm & Roberts dalam Rakhmat (1994), beranggapan bahwa efek hanya “perubahan perilaku manusia yang setelah diterpa media pesan media massa”. Karena fokusnya pesan maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa, Efek media dapat diartikan sebagai dampak dari kehadiran sosial yang dimiliki media, yang menyebabkan perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku manusia.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa media cenderung menciptakan *agenda setting* dalam setiap pemberitaannya. Dearing&Rogers (1996), mendefinisikan *agenda setting* sebagai *an ongoing competition among issue Protagonists to gain the attention of media professionals, the public and policy elite* (persaingan terus-menerus di antara berbagai isu penting untuk mendapatkan perhatian dari para pekerja media, publik dan penguasa). Bryant&Thompson (2002), menyatakan agenda setting adalah: *A strong link between news stories and public issue salience, or the importance placed upon particular issues* (hubungan yang kuat antara berita yang disampaikan media dengan isu-isu yang dinilai penting oleh publik). Lazarsfeld menyatakan agenda setting sebagai: *the power to structure issues* (kekuasaan untuk mengatur berbagai isu). McCombs&Shaw (1972), menyatakan bahwa media massa memiliki kemampuan memindahkan hal-hal penting dari agenda berita mereka menjadi agenda publik. Kita menilai penting apa saja yang dinilai penting oleh media.

Menurut McQuail (2002), bahwa efek media massa memiliki typologi yang mana terdiri dari empat bagian yang besar. Pertama, efek media merupakan efek yang direncanakan. Kedua, efek media massa yang tidak direncanakan atau tidak dapat diperkirakan. Ketiga, efek media massa terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras memengaruhi seseorang masyarakat. Keempat, efek media massa berlangsung dalam waktu yang lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap yang ditunjukkan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang merupakan efek dari keperkasaan media yang mampu mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan aktivitas kehidupan yang dijalannya. Dennis McQuail mendefinisikan komunikasi massa yaitu suatu industri yang tumbuh dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, memproduksi barang dan jasa, serta menghidupi industri lainnya yang terkait, media massa juga merupakan suatu industri yang memiliki aturan-aturan dan norma-norma yang menghubungkan dirinya dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya, dan sebagai institusi sosial media massa diatur oleh masyarakat (Unde, 2014).

Senada dengan pendapat tersebut di atas dalam teori pembentukan opini publik ada faktor-faktor yang mendasarinya, faktor-faktor tersebut menurut Rajecki (1982), yaitu mempunyai tiga komponen, yang dikenal dengan istilah *ABCs of Attitude*, penjelasannya sebagai berikut *Affect* (perasaan atau emosi) komponen ini berkaitan dengan rasa senang, suka, sayang, takut, benci, sedih, dan kebanggaan hingga muak atau bosan terhadap sesuatu, sebagai akibat setelah merasakannya atau timbul setelah melihat dan mendengarkannya. Kemudian komponen efektif tersebut merupakan evaluasi berdasarkan perasaan seseorang yang secara emotif (aspek emosional) untuk menghasilkan penilaian, yaitu “baik atau buruk”. *Behaviour* (tingkah laku) komponen ini lebih menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang, misalnya bereaksi untuk memukul, menghancurkan, menerima, menolak, mengambil,

membeli dan lain sebagainya. Jadi merupakan komponen untuk menggerakkan seseorang secara aktif (*action element*) untuk melakukan "tindakan atau berperilaku" atas suatu reaksi yang sedang dihadapinya. *Cognition* (pengertian atau nalar) komponen kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai suatu informasi, pesan fakta dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya. Artinya kognitif tersebut merupakan aspek kemampuan intelektualitas seseorang yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan (Ruslan, 2003).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sikap anggota DPRD Kabupaten Pinrang menilai bahwa pemberitaan Setya Novanto dalam Metro TV, Kompas TV, dan TV One memang cenderung memihak terutama Metro TV dan TV One, hanya Kompas TV yang cenderung netral. Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Pinrang beropini bahwa media berusaha menciptakan agenda setting dalam setiap pemberitaannya, terutama dalam Metro TV, TV One, dan hanya Kompas TV yang cenderung lebih berimbang dalam pemberitaannya. Netralitas dan perimbangan media menurut anggota DPRD Kabupaten tidak pernah terjadi, itu hanya suatu tataran ideal yang hendak dicapai. Metro TV dan TV One dianggap tidak netral dan berimbang. Media saat ini sudah menjadi konglomerasi dan industrialisasi jadi mustahil untuk mengatakan kalau tidak ada konflik kepentingan, media seharusnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Berdasarkan kesimpulan di atas maka untuk mencapai netralitas dan perimbangan pemberitaan media maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut kepada pemerintah agar lebih mensosialisasikan tentang undang-undang pers dan undang-undang penyiaran supaya media dan masyarakat mengetahui rambu-rambu yang mengatur terkait hal tersebut. Legislatif diharapkan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memformulasi undang-undang mengenai pers dan penyiaran agar lebih tajam bentuk sanksinya. Media seyogyanya selalu berpedoman dengan kode etik pers dalam setiap pemberitaannya dan selalu mengedepankan praduga tak bersalah kepada seseorang sebelum memberitakannya. Masyarakat umum agar selalu jeli dalam melihat suatu tayangan dan lebih mengedepankan rasionalitas ketimbang emosi.

## REFERENSI

- Bryant J.&Thompson S. (2012). *Fundamentals of media effects*. Waveland Press.
- Cangara H. (2014-a). *Komunikasi Politik : Konsep,Teori dan Strategi. Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Cangara H. (2014-b). *Pengantar Ilmu Komunikasi. Edisi Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Dearing J.W.& Rogers E. (1996). *Agenda-Setting*. Sage Publications.
- Hasrullah. (2009). *Dendam Konflik Poso (periode 1998 -2001) Konflik Poso dari Perspektif Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- McCombs M. E.&Shaw D.L. (1972). The agenda setting function of mass media. *Public opinion quarterly*, 36(2): 176-187.
- McQuail D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications
- Rajecki D.W. (1982). *Attitude, themes and Advence*.

Rakhmat J. (1994). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Ruslan R. (2014). *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasinya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Unde A. (2014). *Televisi & Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Prenadamedia Group.